

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangguran dan kemiskinan merupakan masalah di Indonesia. Sebaliknya, masalah pengangguran disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja pada angkatan kerja pedesaan dan perlu diatasi dengan pendekatan interdisipliner dengan aspek pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus mencakup unsur pengembangan kapasitas dan ketergantungan pada pemanfaatan.¹ Selain itu, masalah kemiskinan di Indonesia bukan hanya merupakan akibat dari kejadian yang muncul begitu saja, tetapi juga akibat dari masalah yang lainnya, yang belum teratasi dengan baik seperti tingkat populasi masyarakat yang semakin tinggi, kurangnya penguasaan sumberdaya alamnya, kreativitas seseorang tidak diberi ruang secara penuh dalam berkembang, dan sebagainya, pemerintah juga harus memfokuskan untuk memecahkan masalah kemiskinan negara.

Kemiskinan tidak hanya terjadi di wilayah metropolitan, itu juga ada di desa-desa, khususnya di kecamatan Mayong. Kemiskinan desa membuat individu semakin tertinggal dalam segala batasan yang ada, termasuk kendala ekonomi. Dalam keadaan seperti itu, masyarakat meminta bantuan kepada pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat.²

Kenyataan yang ada di pedesaan menunjukkan bahwa permasalahan seperti kekurangan modal (*capital deficiency*) tetap menjadi kendala utama pembangunan pedesaan. Dalam model pemberdayaan ekonomi, masyarakat dapat mengurangi kemiskinan dengan menggunakan dana kegiatan simpan dan pinjam guna meningkatkan taraf kesejahteraan di masyarakat.³

Ada beberapa faktor keberhasilan yang dapat dinilai dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup seseorang secara nyata. Suyatno mendefinisikan kesejahteraan masyarakat sebagai penurunan

¹ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 64

²M. Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Pers, 2002), 136.

³M. Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, 137.

kemiskinan, peningkatan kesehatan, memungkinkan akses ke tingkat pendidikan yang tinggi, dan mempromosikan output masyarakat.⁴

Rumah tangga miskin (RTM) merupakan salah satu indikator yang dipakai dalam rangka mengukur kesejahteraan. Realitanya, banyak perempuan tidak dapat berperan aktif dalam perekonomian keluarganya, dan tergantung pada penghasilan seorang suami. Rutinitas seorang perempuan di rumah diasumsikan sebagai penerima pasif pembangunan. Salah satu perdebatan yang paling menarik adalah tentang pemberdayaan ekonomi perempuan. Pemberdayaan perempuan dalam bisnis adalah salah satu ukuran peningkatan kesejahteraan. Ketika perempuan mendapatkan pendidikan, memperoleh hak milik, dan memperoleh kemampuan untuk bekerja di luar rumah dan mencari nafkah sendiri, ini mencerminkan peningkatan kesejahteraan rumah tangga.⁵ Semua itu juga merupakan bagian dari peningkatan pemberdayaan perempuan.

Pemberdayaan perempuan ialah upaya yang disengaja dan sistematis untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan tersebut bertujuan menunjukkan kondisi dan posisi perempuan sehingga tercapai derajat yang setara dengan laki-laki. Pemberdayaan perempuan dimungkinkan karena dibentuknya Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang telah menjadi tumpuan perekonomian masyarakat dan merupakan pilihan terbaik bagi perempuan yang ingin meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan kelompoknya.⁶

Pemberdayaan adalah istilah yang mengacu pada proses memperoleh atau memasok sumber daya dan metode, serta proses yang memungkinkan akses dan kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kapasitas untuk menumbuhkan kekuatan melalui kemauannya sendiri atau melalui kemauan pihak lain. Pemberdayaan memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan, serta kesadaran, untuk mencapai dan mewujudkan keadaan yang lebih baik.⁷

Peran serta dari pemerintah sangat berpengaruh terhadap perumusan kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakannya harus di terapkan secara komprehensif, baik di kalangan menengah

⁴Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 64

⁵Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 1993), 5

⁶Totok Mardikanto dan PoerwokoSoebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 24.

⁷Totok Mardikanto dan PoerwokoSoebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 25.

ke atas maupun ke bawah, tanpa mengutamakan kelompok tertentu. Hal ini untuk mencegah kelompok tersebut merasa diperlakukan tidak adil.⁸ Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah inisiatif yang disponsori pemerintah yang bertujuan untuk mengintegrasikan pengentasan kemiskinan. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan salah satu program yang dijalankan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Mayong. Hal ini bertujuan untuk membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya melalui pembiayaan modal usaha melalui program yaitu Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Program SPP ini menawarkan sumber daya dalam bentuk pinjaman modal usaha kepada pengusaha perempuan yang saat ini memiliki atau ingin memulai bisnis.

Program SPP membantu pengusaha perempuan yang telah memiliki kegiatan simpan pinjam untuk menutupi biaya modal perusahaan mereka. Bentuk kegiatannya yaitu berupa pemberian dana yang dipinjamkan untuk tambahan modal usaha para perempuan. Mekanisme SPP dilakukan secara kredit, dengan setiap pinjaman dibayar dengan angsuran bulanan selama periode satu tahun. Ada tambahan 1.3 persen yang termasuk dalam pembayaran kredit ini, yang disebut sebagai kompensasi. Musyawarah Antar Desa (MAD) menentukan besaran pelayanan pinjaman.⁹

Dengan adanya peraturan pemerintah No.39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang dikeluarkan oleh departemen dalam negeri dalam rangka pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan, PTO beserta penjelasannya menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan dana bergulir bagi masyarakat yang dikelola oleh UPK.

UPK bukan lembaga yang semata-mata mencari keuntungan namun juga harus menghasilkan keuntungan. UPK ini dapat digambarkan sebagai lembaga keuangan mikro dengan misi memberdayakan masyarakat. Hal ini karena UPK adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa

⁸Sochimim, *Kewirausahaan Teori Aplikatif dan Praktik*, (Yogyakarta: Cinta Buku, 2017), 18.

⁹Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*, (Jakarta, 2007), 19.

konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. UPK tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga pemberdayaan. Di sisi lain, lembaga yang menangani simpanan wajib terlibat dalam LKM, dalam hal ini berlaku juga UPK. UPK yang baik tidak hanya menghasilkan keuntungan ala kadarnya tetapi juga tingkat keuntungannya harus *satisfactory* (memuaskan).¹⁰

Praktik SPP yang ada di UPK Kecamatan Mayong, pinjamannya memberikan bunga tetap atau nilai tambahan (dalam 12 bulan) yang telah disepakati diawal, dan tidak dipungut adanya tambahan biaya atau denda jika terdapat anggota yang belum bisa melunasi pinjamannya saat sudah jatuh tempo. Namun anggota kelompok tersebut harus konfirmasi dengan ketua kelompoknya dan pihak UPK untuk meminta kelonggaran waktu dalam membayar. Konsekuensi yang diterima jika terdapat salah satu kelompok yang mangkir dalam pembayaran maka jadwal pencairan kelompok tersebut pada tahun depan akan dimundurkan sampai hutang dikembalikan. Adanya tambahan biaya atau bunga yang ditetapkan diawal tadi digunakan untuk biaya administrasi, yaitu untuk menutupi kredit macet dari pinjaman kelompok lain dan juga digunakan untuk kegiatan dana sosial kepada masyarakat yang memerlukan pertolongan.¹¹

SPP ini memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dengan memberikan dukungan modal kepada organisasi simpan pinjam perempuan. Kelompok sasaran program ini adalah keluarga miskin produktif yang akan mendapatkan uang tunai untuk operasional bisnis melalui organisasi yang menangani rekening tabungan dan dana pinjaman perempuan. Secara umum SPP dapat membantu mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudian akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.¹² Program SPP ini telah ada sejak tahun 2007, ketika menjadi fokus utama PNPM Mandiri

¹⁰Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*, 20

¹¹Cyntia Putri Devanty, dan Ida Ayu Nyoman Saskara, “Peran Koperasi Wanita Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Pada Koperasi Wanita di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar”, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol.6, No.4, 2017, 19.

¹²Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*, (Jakarta: 2007), 58.

Perdesaan, dimana PNPM Mandiri merupakan pemberdayaan terbesar di Indonesia.

Aspek penting dari program pemberdayaan masyarakat yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri, menanggapi pemenuhan kebutuhan primer masyarakat, ikut andil membantu masyarakat miskin, dan kelompok lain yang diabaikan, untuk membangun sumberdaya desa dan sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat. Sumberdaya desa merupakan nilai tradisi dengan memperhatikan dampak masyarakat dan lingkungan tanpa menimbulkan ketergantungan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan kegiatan yang berkelanjutan.¹³ SPP adalah pilihan non-bank untuk pengentasan kemiskinan pedesaan yang memberikan pembiayaan kepada perempuan dengan tingkat bunga yang lebih murah daripada bank, dengan tujuan membantu perempuan dalam meningkatkan taraf hidup mereka melalui pengembangan usaha yang dikelola.

Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan kegiatan SPP memerlukan teori yang dapat memberikan gambaran bagaimana menilai suatu pencapaian kelompok dalam hasil yang sudah dicapai. Kegiatan SPP dapat berhasil jika semua elemen yang terlibat bekerja secara efektif. Namun dalam hal mengelola kegiatan, tidak semua kelompok simpan pinjam dapat mengelola kegiatannya, yang mengakibatkan ketidak sesuaian antara tujuan dan hasil yang diperoleh dari perusahaan yang dikelola. Putusnya hubungan antara tujuan dan pencapaian ini dapat menghambat proses pencairan uang tunai ke pihak lain.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai pemberdayaan perempuan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga (1) penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Hasanah dengan judul “*Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan)*” dari penelitian tersebut peneliti mengkaji bahwa pemberdayaan perempuan melalui kegiatan simpan pinjam memiliki potensi untuk mengatasi kemiskinan yang dihadapi kaum perempuan dan keluarganya.¹⁴ (2) penelitian yang telah dilakukan oleh Anifatus Solihah dengan judul “*Pemberdayaan Perempuan dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam*” dari

¹³Cyntia Putri Devanty, dan Ida Ayu Nyoman Saskara, “Peran Koperasi Wanita Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Pada Koperasi Wanita di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar”, 22.

¹⁴ Siti Hasanah, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan)”, *Jurnal SAWWA*, 1, No.9, 2013.

penelitian tersebut peneliti mengkaji bahwa perempuan yang diberdayakan membantu perekonomian keluarga namun tidak melalaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, melalui Home Industry Bulu Mata di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas perempuan telah ikut andil bagian dalam menambah pendapatan keluarga.¹⁵ (3) penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyu Tjiptaningsih dengan judul "Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha Perempuan di Desa Sindangkempeng Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon)" dari penelitian tersebut peneliti mengkaji bahwa pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui pendekatan penguatan organisasi yang ada mampu menunjang kemandirian kaum perempuan guna memperkuat kapasitas kaum perempuan (*capacity building*) untuk membantu pendapatan ekonomi keluarga.¹⁶ (4) penelitian yang telah dilakukan oleh Agus Setiawan, Utami Chairany, dan Kismiyati El Karimah dengan judul "Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Ibu Inspirasi "KOPERNIK" Dalam Mengentaskan Kemiskinan" peneliti mengkaji bahwa pemberdayaan perempuan dengan membangun ketrampilan dan rasa percaya diri ternyata berdampak baik dalam perubahan di wilayahnya masing-masing, terlepas dari pekerjaan yang sedang dijalannya.¹⁷ (5) penelitian yang telah dilakukan oleh Nur Syaidah dengan judul "Pemberdayaan Perempuan/Ibu Rumah Tangga Melalui Kegiatan Simpan Pinjam Di Koperasi Sumber Rezeki Baru RW 08 Penjaringan Jakarta Utara" dari penelitian tersebut peneliti mengkaji bahwa koperasi dapat memberdayakan perempuan melalui kegiatan simpan pinjam, dimana anggota dapat meminjam modal untuk membuat usaha dan meningkatkan pendapatan taraf ekonomi keluarga.¹⁸

¹⁵ Anifatus Solihah, Pemberdayaan Perempuan dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam, (*Skripsi IAIN Purwokerto*, 2016).

¹⁶ Wahyu Tjiptaningsih, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha Perempuan di Desa Sindangkempeng Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon)", *Jurnal Ilmiah Administrasi*, 2, No.1, 2017

¹⁷ Agus Setiawan, Utami Chairany, dan Kismiyati El Karimah, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Ibu Inspirasi "KOPERNIK" Dalam Mengentaskan Kemiskinan", *Jurnal Common*, 2, No.2, 2018.

¹⁸ Nur Syaidah, "Pemberdayaan Perempuan/Ibu Rumah Tangga Melalui Kegiatan Simpan Pinjam Di Koperasi Sumber Rezeki Baru RW 08 Penjaringan Jakarta Utara", (*Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2020).

Adanya pemberdayaan perempuan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara merupakan salah satu wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), dimana ketentuan tersebut dilihat berdasarkan dari tingkat kemiskinannya. Dengan mayoritas masyarakatnya yang bekerja sebagai petani dan pengrajin dinilai penghasilannya kurang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, oleh karena itu masyarakat khususnya perempuan di kecamatan Mayong mengandalkan kegiatan SPP untuk digunakan sebagai modal usaha mikro seperti berdagang dilakukan oleh kaum perempuan guna membantu perekonomian keluarga agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, peneliti tertarik mengambil judul ini berdasarkan fenomena yang ada saat ini mengenai perkembangan perekonomian di Indonesia dan perubahan lingkungan yang strategis yang dihadapi dunia usaha khususnya usaha kecil menengah saat ini dengan perkembangannya yang sangat cepat dan dinamis. UPK sebagai lembaga yang dicanangkan oleh pemerintah yang senantiasa harus diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata memberdayakan dan meningkatkan pendapatan guna kesejahteraan masyarakat agar mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Peneliti juga tertarik melakukan penelitian di UPK yaitu karena UPK berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, selain memungut biaya tambahan yang ringan dan tanpa jaminan serta lembaga tersebut diawasi oleh pemerintah dengan memberikan sumber daya berupa pinjaman modal usaha bagi masyarakat khususnya perempuan yang sudah memiliki usaha ataupun yang akan membuka usaha. Sehingga SPP menjadi sarana alternatif untuk pengentasan kemiskinan pedesaan yang memberikan pembiayaan kepada perempuan dengan tingkat bunga yang lebih murah daripada bank, dengan tujuan membantu perempuan dalam meningkatkan taraf hidup mereka melalui pengembangan usaha yang dikelola.

Dari penelitian yang dilakukan diatas, belum ada yang mengkaji lebih mendalam mengenai pemberdayaan perempuan melalui kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga menurut perspektif syariah, sehingga perlu untuk dilakukan penelitian. Pemberdayaan bagi perempuan diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemberdayaan memiliki tujuan untuk membantu perubahan dari masyarakat yang tidak memiliki daya agar menjadi

produktif maka diperlukan usaha-usaha.¹⁹ Usaha tersebut salah satunya dengan diberdayakannya masyarakat khususnya perempuan. Karena seiring dengan pergeseran waktu, emansipasi, perkembangan teknologi dan pendidikan serta tuntutan zaman membuat tidak hanya laki-laki saja yang menjadi pencari nafkah namun dengan adanya persaingan yang ketat dalam bidang ekonomi tentunya tidak semua seorang suami dapat mencukupi kebutuhan keluarga sehingga seorang ibu juga dituntut untuk mendukung penghasilan keluarga.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik dalam rangka melihat lebih detail bagaimana kajian pemberdayaan perempuan melalui kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh UPK di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yang telah dilaksanakan sejauh ini. Penulis kemudian melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pemberdayaan Perempuan Melalui Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Ekonomi Syariah di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Mayong”

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah perlu dilakukan karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, khususnya waktu, tenaga, kemampuan teoritik yang relevan dengan peneliti, sehingga diharapkan peneliti dapat dilakukan lebih berfokus dan mendalam. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. *Actor*, adapun subyek dalam penelitian ini adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data-data yang diteliti. Subyek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai hasil penelitian. Obyek penelitian pada penelitian ini adalah UPK Kecamatan Mayong. Adapun yang menjadi subyek sekaligus sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah anggota kelompok penerima dana SPP dan UPK sebagai pihak pengelola SPP. Berkaitan dengan tema yang penulis angkat, yaitu mengenai “Analisis Pemberdayaan Perempuan Melalui Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Ekonomi Syariah di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Mayong”, sesuai dengan judul, maka fokus penelitian ini adalah menganalisis pemberdayaan perempuan melalui kegiatan simpan pinjam pada UPK yang di khususkan pada kelompok perempuan di kecamatan Mayong.

¹⁹Abdul Kadir, *Pengantar Teori Pembangunan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2012), 16.

2. *Act*, pada penelitian ini aktivitas yang terjadi adalah adanya interaksi antara anggota kelompok penerima dana SPP yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.
3. *Place*, tempat yang digunakan dalam analisis pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga menurut perspektif Ekonomi Islam yaitu di tempat kerja UPK Kecamatan Mayong.

C. Rumusan Masalah

Menurut hal tersebut, maka penulis mengajukan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Praktik Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Mayong?
2. Bagaimana Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dengan Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Mayong?
3. Bagaimana Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Mayong Menurut Perspektif Ekonomi Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui Praktik Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan SPP di UPK Kecamatan Mayong.
2. Untuk mengetahui Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga dengan Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan SPP yang ada di UPK Kecamatan Mayong.
3. Untuk menganalisis Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan SPP dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di UPK Kecamatan Mayong Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dan temuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini bisa memberikan informasi tentang pandangan ekonomi syariah tentang Simpan Pinjam yang dipraktikkan oleh Kelompok Perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Mayong.
 - b. Untuk lembaga, penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai seberapa besar peran pemerintah dalam berkontribusi menguatkan ekonomi melalui SPP di UPK
 - c. Untuk masyarakat, hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan menurut perspektif syariah tentang pinjam meminjam bagi masyarakat terutama bagi anggota kelompok penerima dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Mayong.
2. Manfaat Secara Praktis
 - a. Bagi anggota kelompok penerima dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), sebagai motivasi bahwa perempuan mempunyai potensi besar dalam menjalankan usaha dengan baik.
 - b. Bagi Akademik, diharapkan penelitian ini menjadi referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadikan referensi kedepannya, serta sebagai faktor pilihan kebijakan dalam penyaluran dana simpan pinjam.
 - c. Bagi Peneliti, temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan referensi ilmiah mengenai peran pemberdayaan perempuan melalui kegiatan SPP dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga menurut perspektif ekonomi syariah sehingga dapat memahami dan menemukan bahwa pemberdayaan perempuan ini dapat memberikan kesejahteraan bagi ekonomi keluarga.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan skripsi, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi:

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka tentang praktik simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) dalam perspektif ekonomi syariah, dan kendala yang terdapat dalam pelaksanaan praktik simpan pinjam di UPK, serta hasil penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menerangkan dan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab inti dimana didalamnya berisi tentang penjelasan mengenai deskripsi objek penelitian serta analisis data dan pembahasan yang akan dilakukan, sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran dari peneliti.

3. Bagian Akhir

Bagian ini mencakup daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.